



## **Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung**

Ane Sachintania<sup>1\*</sup>, Devi Fujianti<sup>2</sup>, Gunardi<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Piksi Ganesha, Indonesia

\*Email : [dfujianti@piksi.ac.id](mailto:dfujianti@piksi.ac.id)

Doi : <https://doi.org/10.37339/e-bis.v5i2.747>

Diterbitkan oleh Politeknik Dharma Patria Kebumen

### **Info Artikel**

Diterima :  
2021-10-26

Diperbaiki :  
2021-10-27

Disetujui :  
2021-10-28

### **ABSTRAK**

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang seringkali dijadikan indikator kemajuan suatu daerah. Suatu daerah mendapatkan sumber pendapatannya dari potensi daerah itu sendiri. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pendapatan pajak daerah yang sangat potensial di kabupaten Bandung. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bandung, serta untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bandung. Teknik analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dan analisis deskriptif, sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efektifitas. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa (1) efektivitas pajak bumi dan bangunan kabupaten Bandung dari 2016-2020 mengalami kondisi berfluktuasi dengan rata-rata 112,13% dalam kategori yang sangat efektif. (2) Kontribusi PBB-P2 di Kabupaten Bandung sejak 2016-2020 memiliki kontribusi rata-rata 101,75% dalam kategori yang sangat baik.

**Kata Kunci:** Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak, Pendapatan Daerah, Efektivitas, Kontribusi

### **ABSTRACT**

*Regional original revenue is a source of income that is often used as an administration of an area of progress. This study has the goal to know the level of effectiveness and contribution of the Earth and Rural Building and Urbanity to the original revenue of Regency of Bandung Regency, and to know the effort to increase regional tax revenues conducted by the Regional Revenue Agency of Bandung Regency. The analysis technique used is quantitative method and descriptive analysis, while the analytical tool used in this research is the effectiveness analysis. From the results of the study can be seen that (1) Effectiveness of Tax and Bandung Regency of the Regency of Bandung from 2016-2020 experienced fluctuating conditions with an average of 112.13% in a very effective category. (2) The contribution of the Earth and Building Taxes in Bandung Regency since 2016-2020 has an average contribution of 101.75% in excellent category.*

**Keywords:** Land and Building Tax, Tax, Local Revenue, Effectiveness, Contribution

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan donasi wajib yang bersifat memaksa yang bertujuan untuk negara, baik untuk pribadi atau badan menurut Undang-Undang. Pajak juga merupakan sumber pendapatan bagi negara yang hasilnya digunakan dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan negara. Fungsi pajak meliputi fungsi anggaran yaitu fungsi pajak digunakan sebagai alat memasukan dana ke dalam kas negara secara optimal, termasuk fungsi regulasi yaitu pajak menjadi alat dalam mengatur perekonomian nasional, terdapat fungsi stabilitas yang mana pajak berfungsi dalam membantu mengendalikan inflasi, dan fungsi pendistribusi pendapatan yaitu pajak yang dikumpulkan negara digunakan untuk menyediakan semua dana publik. (Sari, 2008)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan iuran wajib dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan/perusahaan dikarenakan memiliki hak atas bumi beserta bangunan (Sulasdiono, 2018). PBB ialah pajak wilayah berpotensi besar dalam upaya menaikkan taraf pendapatan daerah berdasar pada wilayah masing-masing.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009, tiap-tiap macam pajak atas wilayah mengharuskan untuk ditetapkan oleh peraturan daerah, sehingga mampu memungut sesuai daerah itu sendiri. Pajak daerah memiliki syarat untuk tidak membolehkan berkaitan dengan keperluan orang banyak atau berdasar pada aturan perundang-undangan, dikarenakan berkaitan peraturan daerah.

Pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam usaha menaikkan tingkat pendapatan asli wilayahnya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan berdasar wilayah masing-masing. Demikian pemerintah diwajibkan untuk memiliki kemampuan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan secara lancar sehingga tercapainya rencana sesuai yang diinginkan yaitu meningkatnya PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk contoh kemandirian suatu wilayah yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan untuk kegiatan atas sumber PAD termasuk faktor penting yang dimiliki oleh PAD itu sendiri. Kontribusi terbesar yang berhubungan dengan pendapatan daerah adalah Pajak Daerah. (Damas Dwi Anggoro, S.AB, 2017)

Penelitian ini bertempat di Kabupaten Bandung, dikarenakan Kabupaten Bandung salah satu daerah dengan potensi PBB cukup besar, baik itu digunakan sebagai tempat tinggal dan juga bisa digunakan untuk berinvestasi guna meningkatkan kemajuan ekonomi suatu daerah. Peneliti memiliki tujuan agar dapat mengetahui presentase dari efektivitas, serta untuk melihat banyaknya kontribusi penerimaan PBB-P2 yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung terhadap Pendapatan Asli Daerahnya.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bandung Periode 2016-2020**

Periode	Target	Realisasi
2016	82.829.109.236	93.198.039.206
2017	95.500.000.000	101.686.820.619
2018	97.000.000.000	104.650.994.168
2019	100.000.000.000	110.294.209.287

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Efektivitas**

Gambaran dari keberhasilan dalam kegiatan merealisasikan sesuai rencana yang telah diatur untuk Pendapatan Asli Daerah dan mampu membandingkannya dengan target berdasarkan potensi wilayahnya yang sudah ditetapkan merupakan definisi analisis efektivitas pajak daerah. (Adelina, 2013)

Efektivitas yaitu sejauh mana keberhasilan orang yang melakukan pekerjaan sesuai yang diharapkan. Sehingga, jika sebuah urusan mampu dibereskan dan dinyatakan berhasil dikarenakan urusan tersebut berjalan berdasarkan rencana yang telah diatur, meliputi periode beserta tarifnya. (Lohonauman, 2013)

Efektivitas sendiri yaitu sebuah tingkat keberhasilan yang berasal dari orang atau badan sesuai tujuan yang telah dibuat dan ingin dicapai menggunakan cara tertentu. Besarnya suatu keberhasilan itu dicapai dalam suatu rencana maka suatu kegiatan dapat dikatakan semakin efektif.

Dari penjelasan diatas yakni jika ukuran yang mampu menyatakan seberapa jauhnya target yang sudah ditentukan dan mencapai tujuannya merupakan pengertian dari efektivitas. Juliastiana dan Suartana (2013) menjelaskan bahwa kenaikan efektivitas sumber pendapatan dengan tujuan memperbaiki tingkat kenaikan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan dengan potensi yang dimiliki.

### **2.2. Kontribusi**

Kontribusi yaitu iuran yang berbentuk hadiah dari anggota maupun masyarakat. Sumbangan ini nantinya dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kontribusi disini memiliki maksud yaitu sumbangan yang berasal dari perolehan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerahnya. Saat sumber penerimaan PBBnya tinggi serta mampu dioptimalkan secara baik maka kontribusi akan mengalami peningkatan atas Pendapatan Asli Daerahnya. (Lintong et al., 2018)

Analisis kontribusi digunakan melalui suatu tujuan melihat seberapa besar seluruh pendapatan wilayah guna mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat memberikan gambaran nyata kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan pendapatan daerah tersebut.

### **2.3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

PBB sendiri menurut UUPBB merupakan pungutan yang memperoleh untuk seseorang maupun perusahaan mendapatkan sebuah keuntungan dari suatu bumi juga bangunan. Suatu bangunan berupa konstruksi berdiri dan bumi berupa tanah juga perairan yang ada di Indonesia. (Sulasdiono, 2018)

Bumi dan Bangunan merupakan objek dari PBB-P2. Selain itu, bangunan beserta tanah yang dipunyai serta mempunyai manfaat dilakukan oleh seseorang maupun perusahaan, kecuali

bagi urusan bisnis seperti urusan hutan, pertambangan, atau perkebunan. Sementara itu, seseorang atau perusahaan yang memiliki wewenang dari bumi beserta bangunan tersebut adalah subjek dari PBB-P2. (Sulasdiono, 2018)

Tarif PBB ditetapkan untuk yang paling besar yaitu 0,3% dari NJOP (nilai jual objek pajak), serta tarif paling rendah sebanyak 0,1% dari NJOPnya. Aspek kompetensi dari pemerintah daerah dalam kegiatan pendaftaran subjek beserta objek dari pajak yang terlihat dari pungutan PBB-P2 belum optimal, disebabkan kecilnya tingkat perolehan yang didapatkan. (Mardoni, 2021)

#### **2.4. Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian PAD yaitu sumber penerimaannya wilayah dari pungutan tiap wilayah dan diatur oleh peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah ini yakni menyerahkan tanggung jawab terlaksananya otonomi daerah berdasarkan kemampuan daerah itu sendiri kepada pemerintah daerah. (Sulasdiono, 2018)

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemasukan kas suatu daerah yang mampu menambah kekayaan daerah tersebut didalam jangka waktu satu periode serta tidak mengharuskan untuk dibayar lagi merupakan pengertian PAD (Pendapatan Asli Daerah). (Wulandari & Iryanie, 2018)

Pendapatan Asli Daerah yakni kemampuan dari penguasa wilayah itu sendiri untuk mendapatkan pendapatan dalam hal memungut pajak. PAD itu sumbernya diantaranya retribusi, pajak, laba badan usaha milik daerah, dan berbagai penerimaan daerahnya dinyatakan sah. Meningkatnya pendapatan wilayah maka tingkat kenaikan belanja suatu wilayah juga mengalami kenaikan dan besarnya pengeluaran yang digunakan guna memenuhi kebutuhan daerah. (Wulandari & Iryanie, 2018)

Pajak daerah yaitu seseorang atau perusahaan yang mempunyai kewajiban memberikan iuran guna berlangsungnya kegiatan pembiayaan pemerintah daerah. Pajak daerah mempunyai 2 tanggung jawab yakni Pajak Provinsi serta Pajak Kabupaten/Kota. Jenis Pajak Provinsi itu yakni PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), BBNKB (Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), dan Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan. Setelah itu terdapat jenis Pajak Kabupaten/Kota yakni Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Wallet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (Wulandari & Iryanie, 2018)

Sehingga dalam mengelola Pajak Daerah ini harus optimal guna mencapai tingkatkan kenaikan kontribusi yang ingin dicapai mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada pajak suatu wilayah inilah sumber pendapatan wilayah itu berada.

Pendapatan wilayah mempunyai kegunaan yang sangat besar, dikarenakan dari pendapatan daerah ini dapat dikaji sudah sejauh mana dapat membiayai pembangunan daerah tanpa bantuan pemerintah pusat.

Dengan itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan modal keuangan wilayah yang diperlukan didalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanannya dihasilkan dari manfaat kemampuan atau sumber daya yang dikuasai daerah tersebut.

## Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah di Kota Bandung  (Sari, 2008)	1) Efektivitas 2) Kontribusi	Di kota Bandung efektivitas PBB mengalami perkembangan disetiap tahunnya, sedangkan tingkat kontribusi sangat rendah.
2.	Analisis efektivitas pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sitaro  (Lohonauman, 2013)	1) Efektivitas	Di Kabupaten Sitaro penerimaan pajak daerahnya terhadap PAD sangatlah efektif. Serta efektifitas penerimaan pajak meningkat selama 3 tahun terakhir.
3.	Analisis efektivitas kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado  (Lintong et al., 2018)	1) Efektivitas 2) Kontribusi	Sangat kurang optimalnya PBB-P2 yang dikelola oleh Kabupaten Minahasa Selatan begitupun di Kota Manado terhadap pendapatan daerahnya.
4.	Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Gresik  (Adelina, 2013)	1) Efektivitas 2) Kontribusi	Sangat efektifnya tingkat penerimaan PBB di Kabupaten Gresik periode 2007-2011, sedangkan tingkat kontribusinya sangat kurang.
5.	Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  (Salmah, 2018)	1) Pengetahuan 2) Kesadaran	Keseimbangan antara pengetahuan dan kesadaran masyarakat membuat tingkat kepatuhannya sangat baik dalam membayar pajak.
6.	Analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan	1) Efektivitas 2) Kontribusi	Tingkat efektivitas di Provinsi Gorontalo sangat

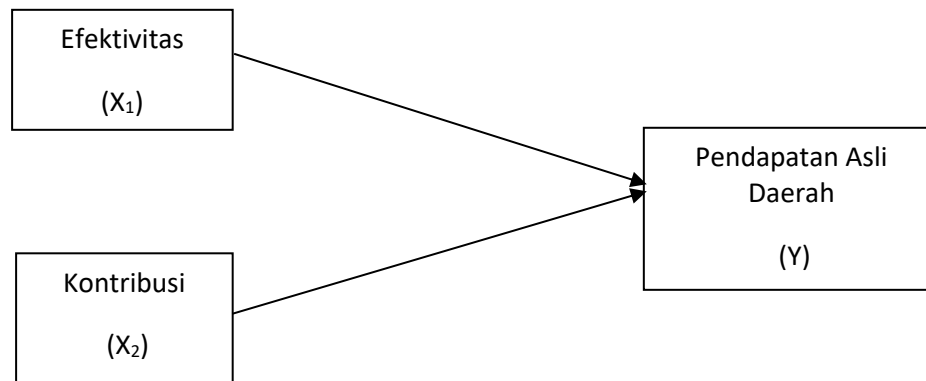
No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo  (Budiarso & Karina, 2016)		efektif, sedangkan tingkat kontribusinya semakin menurun.
7.	Analisis kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan  (Kamaroellah, 2017)	1) Kepatuhan	Tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Pamekasan cukup patuh mengenai kewajibannya.
8.	Analisis efektivitas dan efisiensi retribusi daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014  (Hidayat & Pahlevi, 2016)	1) Efektivitas 2) Efisiensi	Kabupaten Pekalongan periode 2010-2014 tingkat efektifitasnya sangat bagus, sedangkan efisiensinya sangatlah kurang.
9.	Analisis pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Badung Bali  (Taras & Artini, 2017)	1) Efektivitas 2) Efisiensi	Dalam jangka waktu 4 tahun yaitu antara tahun 2011-2015 efektivitas di Kabupaten Badung Bali dinyatakan sangat efektif, begitupun dengan tingkat efisiensi Kabupaten Badung Bali dinyatakan sangatlah baik.
10.	Analisis pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur  (Yasin, 2020)	1) Pendapatan asli daerah 2) Belanja pembangunan	Arah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah beserta belanja pembangunan yaitu keduanya sama-sama positif.

## Kerangka Berpikir

Saat diberikannya wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah, penghasilan PBB juga dipindahkan kewenangannya. Pemindahan kewenangan ini tidak mempunyai pengaruh terlalu besar terhadap keuangan negara, karena sebelum dialihkan tercatat sebagai penerimaan perpajakan, namun dengan sistem dana bagi hasil. Namun mempunyai pengaruh

yang beragam terhadap keuangan daerah yaitu terhadap pendapatan daerah, dimana pendapatan daerah dapat meningkat.

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan sumber keuangan yang cukup, karena dalam membiayai suatu daerah biaya yang dikeluarkan cukup banyak. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yaitu yang mempunyai peran dalam mendanai pembangunan dan pelayanan daerah.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

### 3. METODE

Metode yang dipakai yaitu metode kuantitatif, dimana peneliti adalah kunci dalam mengungkapkan data penelitian. Metode kuantitatif bersifat deskriptif, yang mana lebih condong menggunakan analisis pendekatan induktif. (Hardani et al., 2020:254)

Penelitian deskriptif ialah penelitian yang memberikan gejala, fakta juga peristiwa secara sistematis dan akurat yang berkaitan dengan ciri-ciri populasi atau wilayah tertentu. Dalam penelitian deskriptif tidak memerlukan penemuan atau penjelasan hubungan timbal balik atau pengujian hipotesis. (Hardani et al., 2020:54)

Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang berfokus pada desain, pengukuran, serta masalah perencanaan yang terperinci dengan jelas sebelum pengumpulan sampel dan analisis data. (Hardani et al., 2020:242)

#### Jenis dan Sumber Data

Peneliti memakai data primer dipenelitian ini, dimana data langsung berasal dari sumbernya yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung.

#### Objek Penelitian

Bapenda Kabupaten Bandung merupakan objek dari penelitian ini. Penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Bandung, karena daerah tersebut memiliki potensi dalam peningkatan pendapatan daerah.

## Teknik Pengumpulan Data

Penelitian memakai teknik untuk mengumpulkan data-data dengan cara menghimpun dokumen yang saling berhubungan dengan data target pajak, data kinerja PBB, serta data pendapatan daerah lainnya. Selain data primer peneliti juga melakukan survey ke tempat penelitian.

## Teknik Analisis Data

Menurut Kaul dalam buku Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif (2020:376) menjelaskan bahwa analisis data adalah meneliti literatur secara terorganisir untuk mengungkap fakta unik. Data dipelajari dari sudut yang berbeda, memungkinkan dapat menemukan fakta baru. Teknis analisis data yang dilakukan adalah dengan:

1. Menghitung tingkat efektivitas PBB.

Untuk menghitung tingkat efektivitas Hakim (2013) rumusnya yaitu :

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\% \quad (1)$$

**Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah**

Keterangan	Presentase
Sangat efektif	>100%
Efektif	90-100%
Cukup efektif	80-90%
Kurang efektif	60-80%
Tidak efektif	<60%

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Sari, 2008)

2. Menyusun tabel analisis kontribusi PBB terhadap PAD di Kabupaten Bandung.

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \quad (2)$$

**Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Dari Kontribusi**

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Sari, 2008)



#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PBB merupakan iuran daerah yang memiliki potensi besar untuk menaikkan tingkat pendapatan asli daerah berdasar wilayah masing-masing. Data pendapatan PBB Kabupaten Bandung periode 2016-2020 yaitu:

**Tabel 5. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bandung Periode 2016-2020**

Periode	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas	Keterangan
2016	82.829.109.236	93.198.039.206	112,52%	Sangat efektif
2017	95.500.000.000	101.686.820.619	106,48%	Sangat efektif
2018	97.000.000.000	104.650.994.168	107,89%	Sangat efektif
2019	100.000.000.000	110.294.209.287	110,29%	Sangat efektif
2020	85.000.000.000	96.464.116.046	113,49%	Sangat efektif

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5 PBB-P2 Kabupaten Bandung mengalami kenaikan setiap periodenya, dimulai dari periode 2016 sampai dengan periode 2020. Pada periode 2016 memperlihatkan tingkat efektivitas PBB dengan presentase 112,52% dengan kategori sangat efektif, dikarenakan target yang tidak melebihi realisasi. Begitupun pada periode 2017 sampai dengan periode 2020 tingkat efektivitas dengan kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas PBB-P2 Kabupaten Bandung berdasarkan tabel diatas menunjukkan angka yang melebihi 100% maka angka tersebut dinyatakan angka yang sangat efektif. Maka dapat diketahui bahwa pada periode 2016 sampai dengan periode 2020, tingkat efektivitas tertinggi diperoleh pada periode 2020 sebesar 113,49% dan tingkat efektivitas terendah diperoleh pada periode 2017 sebanyak 106,48% dengan rata rata tingkat efektivitas sebanyak 112,13%.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas PBB-P2 diatas, diketahui bahwa Bapenda Kabupaten Bandung dalam hal realisasi PBB-P2 untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan dapat dinyatakan berhasil.

##### 4.2 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini data PAD di Kabupaten Bandung periode 2016 sampai dengan periode 2020:

**Tabel 6. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bandung Periode 2016-2020**

Periode	Realisasi PBB	Realisasi PAD	Presentase	Kriteria
2016	93.198.039.206	93.198.190.759	99,99%	Sangat Baik
2017	101.686.820.619	101.686.820.619	100%	Sangat Baik

2018	104.650.994.168	103.851.428.461	100,77%	Sangat Baik
2019	110.294.209.287	110.201.134.526	100,08%	Sangat Baik
2020	96.464.116.046	89.412.463.125	107,89%	Sangat Baik

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Tabel diatas mengindikasikan analisis kontribusi PBB-P2 terhadap PAD angka kontribusinya dikriteria sangat baik yaitu lebih dari 50%. Pada periode 2016 PBB-P2 telah menyerahkan sumbangsih atau kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Bandung sebesar 99,99% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 93.198.190.759, periode 2017 sebesar 100% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 101.686.820.619, periode 2018 sebesar 100,77% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 103.851.428.461, periode 2019 sebesar 100,08% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 110.201.134.526, periode 2020 sebesar 107,89% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 89.412.463.125. Dari penjelasan tersebut maka kontribusi terkecil berada pada periode 2016 yakni sebesar 99,99% dengan kriteria sangat baik, sedangkan kontribusi terbesar berada pada periode 2020 yaitu sebesar 107,89% dengan sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa pengolahan PBB-P2 di Kabupaten Bandung sudah maksimal. Maka, semakin besarnya tingkat presentase kontribusi PBB-P2 terhadap PAD menunjukkan sangat berkontribusinya terhadap peningkatan PAD. Hal ini disebabkan peran dari wajib pajak yang aktif dalam pembayaran pajak, serta pelayanan yang baik dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung.

## 5. KESIMPULAN

### Saran

Meskipun penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bandung sudah mencapai tujuan, peningkatan dalam pembayaran pajak harus terus ditingkatkan agar pemerintah daerah dapat terus memenuhi segala kebutuhan daerah tanpa bantuan pemerintah pusat.

### Kesimpulan

Kesimpulan hasil analisis tersebut yakni efektivitas dari PBB-P2 Kabupaten Bandung menunjukkan efektivitas sangat efektif. Dimana pada periode 2016 sampai dengan periode 2020 tingkat efektivitas dari PBB-P2 menunjukkan angka diatas 100%. Serta penerimaan PBBnya sudah mencapai dari tujuan yang telah direncanakan. Dengan diimbangi oleh realisasi penerimaan PBB-P2nya yang telah memenuhi tujuan.

Kontribusi dari PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Bandung diperiode 2016 yakni 99,99%, periode 2017 sebesar 100%, periode 2018 sebesar 100,77%, periode 2019 sebesar 100,08%, dan periode 2020 masing-masing sebesar 107,89%. Tingkat kontribusi ini selalu mengalami peningkatan yang disebabkan oleh realisasi dari PAD serta PBB telah mencapai target.

## REFERENSI

- Adelina, R. (2013). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN GRESIK. 1–20.
- Budiarso, N., & Karina, N. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 715–722. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11774>
- Damas Dwi Anggoro, S.AB, M. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., & Fardani, R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*.
- Hidayat, F. N., & Pahlevi, D. R. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014. 5(2), 123–136.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. R. Agoes Kamaroellah, 4(1), 82. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1158>
- Lintong, F., Sabijono, H., & Kalalo, M. Y. B. (2018). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN KOTA MANADO. 13(4), 200–209.
- Lohonauman, I. L. (2013). Analisis efektivitas pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten sitaro. 4(1), 172–180.
- Salmah, S. (2018). PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( PBB ). 1(2), 151–186.
- Sari, Y. A. (2008). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KOTA BANDUNG. 229, 173–185.
- Taras, T., & Artini, L. G. S. (2017). ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) DALAM UPAYA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG BALI. 6(5), 2360–2387.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah.
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. 3, 465–472.